

ABSTRAK

Nama : Dendi Fatrah Ramadhan
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui *E-Procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Depok.
Jumlah Halaman : 106 Halaman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui *E-Procurement* Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Depok. Hal ini didasari dari permasalahan yang terjadi dalam hal pengadaan barang/jasa khususnya di Kota Depok, dalam hal ini terdapat kasus tindak pidana korupsi dalam proses pengerjaan pengadaan barang/jasa dan juga adanya proses tender yang gagal dalam proses pengadaan barang/jasa di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok. Teori penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dalam konsep atau model George C. Edwards III dengan 4 (empat) indikator diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (1994) dalam Ibrahim MS (2015:111-112) terdiri dari kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian dari 4 (empat) indikator menyimpulkan bahwa indikator komunikasi, cukup baik dalam hal sosialisasi dan koordinasi kepada stakeholder yang terkait bila ada pembaharuan kebijakan pengadaan barang/jasa tetapi masih terdapatnya human *error* yaitu gagalnya lelang dalam proses pelaksanaan tender. Sumber Daya, masih kurangnya dalam jumlah staff atau sumber daya manusia (SDM) hanya beberapa yang sudah menjadi staff fungsional dan juga masih terdapat *up down* dalam masalah server dalam pelaksanaan *e-procurement* bila mengupload berkas diakhir penawaran. Disposisi, dari segi transparan dalam proses pelaksanaan tender sudah cukup baik sedangkan masih terdapat tindak pidana korupsi diluar dari pengawasan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) yaitu terdapatnya permainan dalam hal kualitas barang dalam pengerjaan proyek pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Struktur Birokrasi, memiliki SOP yang jelas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada penyedia.

Kata Kunci : Implementasi, *E-Procurement*, Pengadaan Barang/Jasa.

Referensi : Buku, Jurnal, Skripsi, Artikel, Observasi

Pembimbing : Abdul Rahman, S.AP, MA.